

## **BAB IV**

### **MEDIASI *ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE* (OSCE) DALAM KONFLIK NAGORNO-KARABAKH TAHUN 2008-2017**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai upaya OSCE dalam menangani konflik Nagorno-Karabakh menggunakan konsep organisasi internasional dengan melihat fungsi dari organisasi internasional, dan konsep resolusi konflik dalam praktek penyelesaian konflik menurut James A. Schellenberg melalui pemaksaan (*coercion*), negosiasi/perundingan, peradilan (*adjudication*), mediasi, dan penengah (*arbitration*).

*Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) sebagai organisasi internasional dalam bidang keamanan yang memiliki fungsi untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik di dalam dan di antara negara-negara pesertanya. OSCE menjalankan tugasnya dalam melakukan resolusi konflik pada konflik Nagorno-Karabakh melalui *OSCE Minsk Group*. Upaya mediasi yang dilakukan OSCE dalam menangani konflik Nagorno-Karabakh sejak tahun 2008 setelah adanya peristiwa Pertempuran Mardakert pada 4 Maret 2008, yang merupakan pertempuran terbesar sejak gencatan senjata pada tahun 1994, hingga tahun 2017 adalah melalui misi penilaian lapangan (*field assessment mission*) dan perundingan.

#### **A. Misi Penilaian Lapangan (*Field assesment mission*)**

Misi penilaian lapangan OSCE dilakukan dengan mengunjungi langsung ke daerah yang berkonflik. OSCE melalui *Co-Chairs* teratur melakukan kunjungan terpisah ke wilayah Baku, Yerevan, maupun Nagorno-Karabakh sejak tahun 2008 hingga tahun 2017. Dimana dalam melakukan

kunjungan, OSCE dapat berkunjung lebih dari satu kali setiap tahunnya. Tujuan dari OSCE melakukan misi penilaian lapangan adalah untuk melihat langsung kondisi wilayah yang terdampak konflik. Mengunjungi daerah Nagorno-Karabakh untuk bertukar pikiran dengan masyarakat disana. Sehingga dapat menunjukkan pada kedua negara bahwa konflik hanya membawa kesengsaraan dan OSCE dapat lebih memahami wilayah konflik karena OSCE juga mengikuti latihan pemantauan pada Jalur Kontak (jalur yang rawan terjadi konflik).

Misi penilaian lapangan juga dilakukan untuk bertemu secara langsung dengan Presiden maupun Menteri Luar Negeri dan Pertahanan di negaranya masing-masing dan berkonsultasi membahas langkah-langkah perdamaian agar cepat terealisasikan. Dari pertemuan tersebut, OSCE mendapatkan konfirmasi langsung dari kedua pihak mengenai status dan posisi wilayah mereka. Dalam misi ini *Co-Chairs* juga selalu mengingatkan kedua negara untuk tetap berkomitmen menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh secara damai. Sehingga, pengaruh yang didapatkan dari misi penilaian lapangan pada tahun 2008-2017 adalah komitmen Armenia dan Azerbaijan untuk melanjutkan negosiasi bersama dibawah naungan OSCE dalam mencapai perdamaian.

Setelah terjadi Pertempuran Mardakert, pada 7 Maret 2008, Wakil Ketua A. Matt Bryza dan Perwakilan Pribadi Ketua OSCE, Duta Besar Andrzej Kasprzyk, mengunjungi wilayah Nagorno-Karabakh untuk bertemu perwakilan dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk meredakan krisis dan memulihkan gencatan senjata. (OSCE, 2008). Misi penilaian lapangan tahun 2009 dilakukan dengan kunjungan ke Baku pada 19 Januari dan 5 November 2009, untuk bertemu dengan Presiden Ilham Aliyev dan Menteri Luar Negeri Elmar Mammadyarov, serta kunjungan ke Yerevan pada 20 Januari dan 6 November 2009 untuk bertemu dengan Presiden Serzh Sarkisyan dan Menteri Luar Negeri Edward Nalbandian. Selama tahun 2009, kunjungan *Co-Chairs* dilaksanakan untuk mengingatkan kedua

belah pihak untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan pengaturan tentang gencatan senjata di Konflik Nagorno-Karabakh yang telah disepakati pada 4 Februari 1995 (OSCE, 2009)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa misi penilaian lapangan yang dilaksanakan pada tahun 2008-2009 menggunakan proses mediasi dimana *Co-Chairs* menjalankan tugas sebagai mediator dengan memberikan saran pada pihak berkonflik untuk memulihkan dan mematuhi peraturan mengenai gencatan senjata. Karena konflik yang kembali memanas dan terjadi kontak senjata yang melanggar perjanjian gencatan senjata, OSCE menyarankan kedua belah pihak untuk kembali menegakkan gencatan senjata, untuk mengembalikan kestabilan serta meredakan krisis pada wilayah konflik. Hal tersebut juga dilakukan untuk membatasi pergerakan militer kedua negara sehingga konflik tidak meluas.

Pada sepanjang tahun 2010-2012, misi penilaian lapangan oleh *Co-Chairs* OSCE berfokus pada proses mediasi dengan mengadakan pertemuan terpisah dan berkonsultasi dengan Presiden, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Armenia dan Azerbaijan. Dimulai dari tanggal 20 Januari 2010, *Co-Chairs* bertemu dengan Presiden Armenia di Yerevan disusul pertemuan dengan Presiden Azerbaijan pada 21 Januari di Baku. *Co-Chairs* kemudian kembali mengunjungi Yerevan dan Baku 26-29 Maret 2010 (OSCE, 2010) Memasuki tahun 2011, *Co-Chairs* melakukan misi penilaian lapangan di Yerevan dan Baku pada 8-11 Februari 2011, kemudian pada pertengahan Maret dan awal Juni 2011 kembali ke Yerevan, Baku, dan Nagorno-Karabakh. (OSCE, 2011) Misi penilaian lapangan pada tahun 2012 dimulai pada 2 - 6 Maret 2012 ke Yerevan, Nagorno-Karabakh, dan Baku. Ditutup dengan perjalanan pada 19 - 26 November 2012. (OSCE, 2012) Dalam pertemuan tersebut, kedua presiden menyatakan komitmen menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh secara damai melalui jalur negosiasi dibawah naungan OSCE. (OSCE, 2012)

Pada tahun 2010-2013 *Co-Chairs* juga mengunjungi wilayah Nagorno-Karabakh. Pada 4 - 14 Oktober 2010, *Co-Chairs* berada di wilayah sekitar Nagorno-Karabakh untuk menilai situasi keseluruhan di sana, termasuk aspek kemanusiaan dan lainnya. Dalam perjalanan lebih dari 1.000 kilometer di seluruh wilayah, *Co-Chairs* melihat bukti nyata dari konsekuensi konflik Nagorno-Karabakh. Kota dan desa yang menjadi wilayah konflik hampir seluruhnya telah menjadi reruntuhan. (Mfa.Az, 2017). Pada tanggal 7 Juni 2011, *Co-Chairs* melewati Jalur Kontak dengan berjalan kaki di wilayah Agdam dan pada 21-22 November 2012 mereka bertemu dengan otoritas de facto.

Proses mediasi dilaksanakan secara terus-menerus pada misi penilaian lapangan tahun 2010-2012. Hal ini dilakukan untuk meredam kenaikan konflik yang terjadi pada tahun 2008. Diadakannya pertemuan secara terpisah dengan Presiden, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan masing-masing negara juga sebagai upaya OSCE untuk menggali kebutuhan dari masing-masing pihak serta memberikan saran pada kedua negara untuk mengikuti proses negosiasi untuk mempertemukan kedua pihak yang berkonflik. Sehingga kedua presiden menyatakan komitmen menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh secara damai melalui jalur negosiasi dibawah naungan OSCE. Kunjungan yang dilakukan di wilayah Nagorno-Karabakh juga merupakan upaya mediasi OSCE terhadap otoritas de facto dalam hal penjajakan dan melihat situasi secara langsung serta memperlihatkan pada pihak yang berkonflik bahwa konflik hanya membawa kesengsaraan.

Konflik yang kembali memanas pada tahun 2014, membuat *Co-Chairs* kembali ke Baku dan Yerevan pada 4-5 Februari 2014 untuk bertemu Presiden Azerbaijan dan Presiden Armenia serta berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan. (OSCE, 2014) Selama kunjungan ke Yerevan dan Baku pada 23 Juli 2015, *Co-Chairs* mendesak Presiden untuk menghindari eskalasi kekerasan yang mematikan dan mengambil semua langkah untuk mematuhi gencatan senjata.

(OSCE, 2015) Pada tahun 2016, *Co-Chairs* melakukan misi penilaian lapangan pada 23 - 25 Oktober 2016. *Co-Chairs* bertemu dengan Presiden dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia, Menteri Pertahanan Armenia yang baru diangkat, dan pejabat de facto di Nagorno-Karabakh. Tujuan dari kunjungan *Co-Chairs* adalah untuk membahas situasi setelah kekerasan yang terjadi pada bulan April 2016, dan untuk mengklarifikasi posisi masing-masing negara pada proses negosiasi. Selama pertemuan, kedua pihak mengkonfirmasi bahwa situasi di lapangan relatif stabil. (OSCE, 2016)

Kemudian pada tahun 2017, *Co-Chairs* mengunjungi Yerevan pada 10 Juni 2017 dan Baku pada 19 Juni 2017. *Co-Chairs* melakukan perjalanan ke Nagorno-Karabakh pada 12 Juni 2017 untuk bertemu dengan otoritas de facto, dan mengunjungi sejumlah wilayah di sekitar Nagorno-Karabakh, termasuk distrik Zangelan, Kubatly, Lachin, dan Kelbajar. Di Baku, mereka juga bertemu dengan komunitas Azerbaijan Nagorno-Karabakh. Dalam pertemuan di Baku, *Co-Chairs* membahas pelanggaran gencatan senjata yang mengakibatkan korban pada Jalur Kontak. *Co-Chairs* mengimbau pemimpin Azerbaijan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan mengirimkan pesan yang sama kepada pemimpin Armenia dan otoritas de facto Nagorno-Karabakh. Setelah itu, *Co-Chairs* juga mendorong pihak-pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang akan mengurangi ketegangan pada Jalur Kontak dan perbatasan internasional antara Armenia dan Azerbaijan. (OSCE, 2017)

Konflik yang kembali memanas pada tahun 2014, berpengaruh pada melemahnya proses negosiasi yang dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya. OSCE harus memulai kembali melakukan mediasi untuk meredam konflik. OSCE kembali melakukan mediasi untuk mendesak dan menyarankan kedua pihak menghentikan konflik senjata dan mematuhi perjanjian gencatan senjata pada tahun 2015. OSCE juga mendesak Presiden untuk meredam konflik di wilayahnya. Namun desakan yang dikeluarkan OSCE masih dalam

kapasitasnya sebagai mediator dalam memberi saran. Keputusan tetap berada pada Armenia dan Azerbaijan. Hingga tahun 2017, misi penilaian lapangan juga masih berjalan dengan menggunakan proses mediasi untuk membahas langkah-langkah mengurangi ketegangan pada Jalur Kontak.

## **B. Perundingan**

Perundingan dilakukan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dan melakukan pembahasan bersama untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. OSCE disini berperan sebagai mediator, dimana OSCE menengahi proses perundingan serta memberi saran-saran selama proses berlangsung. OSCE menjadi fasilitator yang menyiapkan tempat untuk perundingan dan juga memberikan bantuan dana untuk proses perundingan. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk terciptanya perjanjian yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak berdasarkan Akta Final Helsinki yang berisi antara lain tidak ada penggunaan kekuatan militer, menghormati kehendak untuk menentukan nasib sendiri, dan menghormati wilayah pihak lain.

Proses negosiasi konflik Nagorno-Karabakh oleh OSCE *Minsk Group* berada dalam kerangka Prinsip Dasar Madrid yang diusulkan oleh *Co-Chairs* pada bulan Desember 2007. Prinsip dasar ini memiliki isi antara lain : (1) pengembalian wilayah di sekitar Nagorno-karabakh kepada kontrol Azerbaijan, (2) penyediaan jaminan untuk keamanan dan *self-governance* bagi status sementara Nagorno-Karabakh, (3) koridor penghubung Armenia dan Nagorno-Karabakh, (4) hak seluruh IDP (*Internally Displaced Persons*) dan pengungsi untuk kembali ke tempat tinggal mereka, dan (5) jaminan keamanan internasional yang mencakup operasi penjagaan perdamaian (*peacekeeping operation*). (Kristiani, 2013) Pengaruh dari proses perundingan pada tahun 2008 hingga 2017 antara lain ditandatanganinya “Deklarasi dalam Konflik Nagorno-Karabakh” yang isinya melanjutkan negosiasi berdasarkan prinsip dasar Madrid oleh Presiden Rusia, Armenia, dan Azerbaijan. Selain itu juga disetujuinya

pertukaran data mengenai orang hilang di bawah naungan Komite Palang Merah Internasional, menegakkan gencatan senjata dan mendukung *Co-Chairs* dalam mekanisme investigasi.

Perundingan-perundingan pada tahun 2008-2017 dimulai pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Armenia, Vardan Oskanian, di Wina pada 14 Maret dan dengan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Elmar Mammadyarov, di Paris pada 15 Maret. Dalam pertemuan tersebut, *Co-Chairs* mendesak kedua negara untuk melanjutkan negosiasi setelah jeda karena pemilihan presiden di Armenia dan mengusulkan kepada para Menteri Luar Negeri untuk mengatur pertemuan pertama antara para pemimpin Armenia dan Azerbaijan sesegera mungkin setelah terjadi konflik Mardakert. (News, 2008)

Dalam KTT NATO di Bucharest pada 2-4 April 2008 *Co-Chairs OSCE Minsk Group* bertemu dengan Presiden dan Menteri Luar Negeri dari Armenia dan Azerbaijan untuk bertukar pandangan tentang cara-cara untuk mengurangi perbedaan antara pihak dan membentuk konsensus tentang Prinsip Dasar untuk Penyelesaian Damai Konflik Nagorno-Karabakh. (OSCE, 2008) Perundingan pada tahun 2008 kemudian dilanjutkan di New York pada 24 dan 26 September 2008 serta pada 2 November 2008 saat pertemuan di Moskow, Presiden Armenia, Azerbaijan, dan Rusia menandatangani deklarasi yang isinya melanjutkan negosiasi berdasarkan prinsip dasar Madrid dan penyelesaian konflik berdasarkan norma dan prinsip hukum internasional. (President.Am, 2008)

Mengawali tahun 2009, *Co-Chairs* mengadakan perundingan dengan Presiden beserta Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan pada 27 dan 28 Januari 2009 pada Forum Ekonomi Dunia. Tujuan dari perundingan ini adalah terciptanya perjanjian yang adil dan seimbang berdasarkan prinsip-prinsip Final Helsinki. (Aysor.am, 2009) Pada 7 Mei 2009, *Co-Chairs OSCE Minsk Group* mengorganisasi pertemuan Presiden dan Menteri Luar Negeri Armenia dan

Azerbaijan di Kedutaan Besar Amerika di Praha. *Co-Chairs* berpendapat bahwa pertemuan ini telah membawa sisi yang lebih dekat ke sebuah terobosan menuju perdamaian. (OSCE, 2009) Dalam pertemuan di Munich pada 22 November 2009, Presiden menginstruksikan Menteri Luar Negeri mereka untuk terus bekerja dengan *Co-Chairs* dalam mendiskusikan poin-poin penting yang belum terselesaikan di proposal *Co-Chairs*. (Geukjian, 2016) Perundingan pada tahun 2009 di akhiri di Athena pada 1 Desember 2009 (OSCE, 2009)

Memasuki tahun 2010, *Co-Chairs* menggelar perundingan di Moskow, Rusia pada 22 April untuk membahas perkembangan terkini, termasuk pertemuan tingkat tinggi di Washington, Baku, dan Moskow. *Co-Chairs* juga akan melakukan perjalanan ke Wina pada awal Mei. (V.Zhavoronkova, 2010) *Co-Chairs OSCE Minsk Group*, Presiden Armenia dan Azerbaijan beserta Menteri Luar Negeri mereka, membahas tahap negosiasi penyelesaian damai konflik Nagorno-Karabakh di Venesia dan Saint Petersburg pada 4 Juni dan 17 Juni 2010. (OSCE, 2010) *Co-Chairs OSCE Minsk Group* mengadakan pertemuan terpisah pada 23 September di New York pada sela-sela sesi Majelis Umum PBB dengan Menteri Luar Negeri Armenia, dan Azerbaijan. Perwakilan Pribadi Ketua OSCE, Duta Besar Andrzej Kasprzyk, menghadiri kedua pertemuan. *Co-Chairs* menginformasikan kedua Menteri tentang persiapan untuk Misi Penilaian Lapangan dan persiapan untuk KTT OSCE di Astana. (Tariverdieyva, 2010)

Sejak kenaikan konflik pada tahun 2008, OSCE segera membuat perundingan untuk membahas cara meredam konflik. OSCE melakukan upaya mediasi dalam pertemuan tahun 2008 untuk menengahi negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan. Pada tahun yang sama dihasilkan deklarasi untuk melanjutkan negosiasi berdasarkan Prinsip Madrid. Hal ini merupakan sebuah kemajuan dari proses negosiasi. Pada tahun 2009, OSCE juga melakukan upaya sebagai fasilitator dengan menggelar pertemuan di Kedutaan Besar Amerika di Praha. Hingga tahun

2010, OSCE terus melakukann upaya mediasi dan bertugas sebagai mediator yang membantu kedua pihak mempersempit masalah dan mencari jalan agar konflik dapat diselesaikan dengan damai.

Dalam KTT Sochi yang diselenggarakan pada 5 Maret 2011, *Co-Chairs OSCE Minsk Group* akan terus bekerja dengan Armenia dan Azerbaijan untuk menciptakan secepatnya proses investigasi yang transparan dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi risiko kesalahan perhitungan, dan menyelamatkan nyawa di area konflik. (Azernews, 2011). Ini menjelaskan proses investigasi menjadi urgensi yang lebih diutamakan untuk menemukan masalah yang sebenarnya terjadi. Hingga pada penghujung tahun 2011, pembahasan yang selalu dibawakan *Co-Chairs* dengan Presiden dan Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan masih seputar langkah-langkah selanjutnya yang bertujuan mencapai penyelesaian damai konflik Nagorno-Karabakh. *Co-Chair* juga selalu mengingatkan pada pihak-pihak yang berkonflik bahwa negara-negara dalam *Co-Chairs* selalu siap membantu dalam mencapai penyelesaian masalah. Pada tahun 2011, mediasi juga terus dilakukan oleh OSCE kepada kedua negara.

Pada tahun 2012-2013, intensitas pertemuan yang diadakan OSCE dan perwakilan dari Armenia dan Azerbaijan menurun. Pertemuan di New York pada 26-27 September 2012 membahas perkembangan terakhir di kawasan konflik dan terus mendesak para pihak untuk kembali ke substansi negosiasi Nagorno-Karabakh. (OSCE, 2012) Pada tahun 2013, perundingan masih tetap berjalan, hanya saja sudah mulai tidak kondusif dan intensitas perundingan masih menurun. *Co-Chairs* mulai mengkhawatirkan masalah penerbangan sipil ke Nagorno-Karabakh dan kekerasan di Jalur Kontak (jalur yang rawan terjadi konflik). *Co-Chairs* menyampaikan kekhawatiran tersebut pada pertemuan di Paris tanggal 2-3 Maret 2013 kemudian mendiskusikan ide untuk memperkuat gencatan senjata. (OSCE, 2013) Pertemuan lanjutan digelar di Krakow, Polandia pada 17 Mei 2013, di New York pada 27 September

2013, dan pertemuan di Wina pada 19 November 2013. Selama pertemuan, *Co-Chairs*, Para Menteri, dan Presiden membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Presiden kemudian menyetujui untuk memajukan negosiasi menuju penyelesaian damai. Mereka menginstruksikan Menteri Luar Negeri mereka untuk terus bekerja sama dengan *Co-Chairs* dengan tujuan mengintensifkan proses perdamaian. (News F. P., 2013)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa penurunan intensitas perundingan yang terjadi pada tahun 2012-2013 diakibatkan karena mulai tidak kondusifnya wilayah konflik karena penerbangan sipil di wilayah Nagorno-Karabakh serta mulai adanya konflik-konflik kecil yang muncul. Namun, tentu OSCE tidak membiarkan begitu saja sehingga dibuatlah pertemuan untuk memperkuat gencatan senjata. Disini OSCE berperan kembali sebagai mediator yang memastikan proses mediasi terus berjalan. Dengan tetap dilakukannya mediasi, membuat Presiden kedua negara setuju untuk memajukan negosiasi menuju penyelesaian damai. Dengan perintah Presiden kepada Menteri Luar Negerinya untuk terus bekerja sama dengan OSCE memperlihatkan bahwa organisasi ini masih akan terus mendampingi proses negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan.

Peningkatan konflik terjadi pada tahun 2014, yang membuat *Co-Chairs* segera mengatur perundingan di Paris pada 24 Januari 2014. *Co-Chairs* menekankan bahwa insiden tersebut merusak negosiasi dan mengurangi prospek perdamaian serta meminta pihak yang berkonflik untuk sepenuhnya menghormati ketentuan-ketentuan perjanjian gencatan senjata. (Armenpress, 2014) Pada 23 Juli 2014, *Co-Chairs* bertemu secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri Armenia dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan. *Co-Chairs* membahas mengenai peningkatan ketegangan dan kekerasan, termasuk pembunuhan yang ditargetkan terhadap warga sipil, di sepanjang Jalur Kontak dan perbatasan Armenia-Azerbaijan.

Mereka meminta Menteri Luar Negeri untuk meredakan ketegangan yang terjadi. (OSCE, 2014)

Pertemuan di Krakow pada 27 Januari 2015 digunakan *Co-Chairs* untuk meminta Azerbaijan memperhatikan komitmennya pada penyelesaian konflik secara damai dan juga meminta Armenia untuk mengambil langkah dalam mengurangi ketegangan. Dalam pertemuan di Munich pada 6 Februari 2015 *Co-Chairs* mengingatkan pentingnya menerapkan perjanjian Presiden untuk bertukar data mengenai data orang hilang di bawah pengawasan Komite Internasional Palang Merah/*International Committee of the Red Cross* (ICRC). Pertukaran data dapat membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak dan memfasilitasi proses rekonsiliasi. Selain itu, *Co-Chairs* menyerukan dimulainya kembali dialog presiden secepat mungkin. (Karabakhfacts, 2015)

Presiden Republik Armenia Serzh Sargsian dan Presiden Republik Azerbaijan Ilham Aliyev kemudian mengadakan pertemuan puncak di Bern pada 19 Desember 2015 di bawah naungan *Co-Chairs*. Presiden mengklarifikasi posisi masing-masing pihak dan membahas kekerasan yang memakan korban, termasuk warga sipil, yang disebabkan oleh penggunaan senjata berat. Para Presiden mendukung *Co-Chairs* mengenai proposal langkah-langkah untuk mengurangi risiko kekerasan di sepanjang Jalur Kontak dan perbatasan Armenia-Azerbaijan, termasuk mekanisme investigasi. (Miller, 2015)

Proses mediasi kembali dilakukan melalui pertemuan di Wina pada 16 Mei 2016, dimana Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk melanjutkan pertukaran data tentang orang hilang di bawah naungan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang dilakukan oleh para Presiden selama KTT Paris Oktober 2014. (Baghdasaryan, 2016) Untuk menstabilkan situasi di wilayah konflik dan menciptakan suasana yang kondusif untuk memajukan proses perdamaian, Presiden Armenia dan Azerbaijan dalam pertemuan di Saint Petersburg pada 20 Juni 2016 menyatakan sepakat untuk meningkatkan jumlah

pengamat internasional dan melaporkan bahwa rezim gencatan senjata di garis kontak telah ditegakkan. (KarabakhFacts.com, 2016)

Pada tahun 2017, pembahasan dalam pertemuan di Munich pada 17 Februari 2017 adalah tentang situasi di sepanjang Jalur Kontak dan perbatasan Armenia-Azerbaijan. *Co-Chairs* meminta pihak Armenia dan Azerbaijan untuk menahan diri di medan konflik maupun dalam komunikasi publik dan mempersiapkan penduduk mereka untuk perdamaian dan bukan untuk perang. (OSCE, 2017) Hingga menjelang akhir tahun 2017, pada pertemuan tanggal 14 dan 16 November 2017 di Moskow, *Co-Chairs* dengan para Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan membahas langkah-langkah konkret dalam menciptakan perdamaian (Report.az, 2017)

Meskipun terjadi kembali kenaikan konflik pada tahun 2014, OSCE tetap menjalankan upayanya dalam menyelesaikan konflik dengan tetap menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antara kedua pihak yang berkonflik. OSCE juga melakukan upayanya sebagai mediator yang memberikan saran-saran mengenai gencatan senjata serta saran kepada para Presiden untuk menekan konflik. OSCE juga memberi saran untuk melakukan pertukaran data orang hilang yang akhirnya pada tahun 2015 disepakati oleh kedua Presiden. Hingga tahun 2017, proses mediasi yang dilakukan OSCE berjalan dengan cukup baik karena walaupun konflik masih terjadi, tetapi kedua Presiden dan Menteri Luar Negerinya tetap mau menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut. Hal ini juga menjelaskan bahwa negara tersebut masih memiliki kepercayaan pada OSCE untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh ini.

Bantuan OSCE dalam hal perundingan juga berupa bantuan dana untuk melancarkan proses perundingan. Setiap tahunnya, OSCE mengalokasikan sekitar 2% anggaran terpadu organisasinya untuk proses upaya penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Bantuan dana dibagi menjadi tiga yaitu

dana untuk kelompok perencanaan tingkat tinggi yang mempersiapkan pasukan penjaga perdamaian OSCE untuk Nagorno-Karabakh, Proses Minsk yang bertujuan untuk mencapai mandat-mandat Minsk Group dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh, serta Konferensi Minsk yang dibuat sebagai forum diskusi antar pihak-pihak yang berkonflik serta melaporkan progres perundingan kepada Ketua OSCE. (OSCE, 2019)

#### **Bagan 4.1 Pendanaan OSCE untuk Perundingan dalam Konflik Nagorno-Karabakh Tahun 2008-2017**



Sumber : [www.osce.org/annual-report/2008-2017](http://www.osce.org/annual-report/2008-2017) (2019)

OSCE setiap tahunnya sekiranya mengeluarkan 2.323.390 Euro untuk konflik Nagorno-Karabakh. Pendanaan OSCE untuk konflik Nagorno-Karabakh terbilang stabil, tidak ada kenaikan atau penurunan pendanaan yang signifikan. Dana paling banyak dikeluarkan untuk Konferensi Minsk dengan rata-rata pendanaan pertahun 1.193.000 Euro. Untuk Proses Minsk pendanaan rata-rata pertahun adalah 930.490 Euro dan 230.440 Euro untuk Kelompok Perencanaan Tingkat Tinggi.

Dalam Kelompok Perencanaan Tingkat Tinggi, pendanaan telah dipersiapkan bagi pasukan penjaga perdamaian agar selalu siap jika sewaktu-waktu diterjunkan ke wilayah konflik untuk menjaga kestabilan dan keamanan wilayah. Dana Proses Minsk juga digunakan untuk merencanakan dan menjamin Konferensi Minsk dapat terus berjalan. Konferensi Minsk menggunakan dananya untuk menjamin pertemuan-pertemuan bagi pihak yang berkonflik dibawah naungan OSCE. Sehingga pihak yang berkonflik dapat bernegosiasi dengan lebih fokus tanpa memikirkan biaya perundingan agar proses perdamaian dapat segera tercapai.

### **C. Keberhasilan Mediasi OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) Tahun 2008-2017**

Dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh pada tahun 2008-2017, upaya OSCE gagal dalam mengakhiri konflik tetapi mampu mereduksi intensitas konflik. Yang dimaksud dengan mengakhiri konflik adalah terciptanya perdamaian diantara pihak yang berkonflik yang menyatakan konflik telah selesai, hasil mediasi dan negosiasi telah tercapai, tidak ada lagi perseteruan, kesepakatan telah disetujui oleh kedua pihak, kedua pihak telah mendapatkan kepentingannya masing-masing yang berarti perdamaian telah tercipta diantara kedua belah pihak. Sedangkan tereduksinya konflik disini dimaksudkan saat konflik belum menemui titik akhir tetapi intensitas konflik tidak begitu tinggi, ditandai dengan sudah adanya kesepakatan-kesepakatan yang disetujui, kontak senjata diwilayah konflik tidak lagi tinggi, serta kemauan pihak yang berkonflik untuk segera menyelesaikan konflik.

Dalam konflik Nagorno-Karabakh, konflik meredam saat pertempuran senjata tidak lagi masif, saat OSCE mampu memberikan saran yang dapat diterima kedua belah pihak dan kedua belah pihak melakukan kemajaan dalam perundingan seperti telah disepakatinya beberapa hal dalam perundingan, saat OSCE mampu membujuk Armenia dan Azerbaijan untuk selalu melakukan negosiasi demi terselesaikannya konflik Nagorno-Karabakh. Dari tahun 2008-2017 OSCE telah

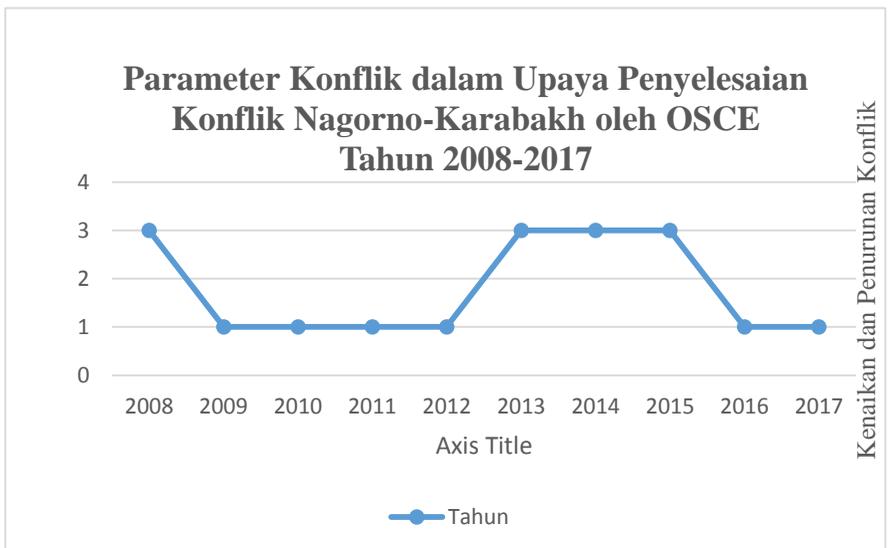
melakukan upaya dengan menghasilkan kemajuan-kemajuan dari proses perundingan, seperti keberhasilan OSCE pada akhir tahun 2008 dimana pada 2 November 2008 saat pertemuan di Moskow, Armenia, Azerbaijan, dan Rusia menandatangani deklarasi tentang kemauan kedua negara untuk melanjutkan negosiasi berdasarkan Prinsip Madrid dan penyelesaian konflik berdasarkan norma dan prinsip hukum internasional. Sehingga pada tahun 2009, dengan adanya kesepakatan yang dibuat konflik mengalami deskalasi.

Dengan perundingan yang semakin intensif dilakukan oleh OSCE pada pertemuan di Vilnius 6 Desember 2011, *Co-Chairs* bersama Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan menyepakati untuk melanjutkan proses negosiasi dan sepakat untuk mengadakan investigasi untuk menyelidiki pelanggaran gencatan senjata. Kemajuan demi kemajuan telah dilakukan OSCE yang membuat konflik wilayah Nagorno-Karabakh masih dalam tahap deskalasi hingga tahun 2012. Pada tahun 2012, setelah melakukan misi penilaian lapangan di wilayah Armenia dan Azerbaijan pada 19-26 November, Presiden Armenia dan Azerbaijan menyatakan komitmen untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh secara damai melalui jalur negosiasi dibawah naungan OSCE.

Namun, proses negosiasi yang menurun pada tahun 2013, membuat konflik kembali mengalami eskalasi dan puncaknya puncaknya saat tentara Azerbaijan menembak helikopter Armenia di distrik Agdham Karabakh. Akibat peristiwa tersebut, pertempuran senjata kembali terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh dan terjadi eskalasi konflik. Dimana upaya OSCE juga mengalami kemunduran. Namun, OSCE tak gentar dan tetap mengadakan perundingan-perundingan untuk kembali meredakan konflik yang terjadi. Perundingan yang rutin dilakukan membuahkan hasil dalam upaya OSCE menyelesaikan konflik karena pada 16 Mei 2016 Armenia dan Azerbaijan menyetujui kesepakatan baru untuk bertukar data tentang orang hilang di bawah naungan Komite Palang Merah Internasional.

Dilanjutkan pada 20 Juni 2016, Presiden Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk meningkatkan jumlah pengamat internasional dan memberikan laporan bahwa rezim gencatan senjata pada wilayah konflik telah ditegakkan. Hingga tahun 2017, OSCE berhasil membawa Armenia dan Azerbaijan untuk selalu hadir dalam perundingan yang dibuat dan membahas langkah-langkah konkret dalam menciptakan perdamaian. Keberhasilan OSCE dalam membuat perundingan dan dengan adanya kesepakatan yang dibuat tersebut membuat konflik di wilayah Nagorno-Karabakh dapat meredam. Dengan semakin ditegakkannya gencatan senjata dan dilakukan investigasi juga mampu meredam penggunaan senjata oleh kedua belah pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa OSCE berhasil meredam konflik di wilayah Nagorno-Karabakh dengan keberhasilan dan cara-cara di atas. Dari penjelasan di atas dapat digambarkan parameter konflik dalam upaya penyelesaian konflik oleh OSCE tahun 2008-2017 sebagai berikut :

**Bagan 4.2 Parameter Konflik dalam Upaya  
Penyelesaian Konflik Nagorno-Karabakh oleh OSCE  
Tahun 2008-2017**



**Keterangan :****1 : Penurunan konflik (Deskalasi)****3 : Kenaikan konflik (Ekskalasi)**

Upaya yang dilakukan OSCE melalui misi penilaian lapangan dan perundingan membuktikan bahwa upaya yang dilakukan OSCE untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh tidak main-main. Dalam melakukan upayanya OSCE menggunakan mediasi sebagai mediator dan fasilitator dan upaya tersebut dilakukan secara teratur setiap tahunnya meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013. Keberhasilan yang dicapai oleh OSCE dalam upaya penyelesaian konflik juga menjelaskan bahwa OSCE dapat meredam konflik Nagorno-Karabakh meskipun belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.